

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PEMUNGUTAN PBB UPT 7 DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN

N a m a : DEDDY WILISTYAN
N P M : 121801044
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA
Pembimbing II : Dr. Warjio, MA

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan melalui Unit Pelaksana Teknis harus benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat dan berdasarkan aspirasi masyarakat, serta tindakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Kota Medan melalui Unit Pelaksana Teknis harus memperhatikan apakah pelaksanaan fungsinya telah sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, menguntungkan rakyat dan memperdulikan rasa keadilan. Maka harus ada pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat, dengan kata lain menunjukkan bahwa dalam konsep akuntabilitas mengandung adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sehingga dapat dirumuskan bahwa Dinas Pendapatan Kota Medan memiliki akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan dan pelaksanaan fungsinya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pemungutan PBB Unit Pelaksana Teknis 7 Medan Utara Dinas Pendapatan Kota Medan.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimanakah Akuntabilitas Pemungutan PBB Unit Pelaksana Teknis 7 Medan Utara Dinas Pendapatan Kota Medan yang ditinjau dari aspek : input, proses, output dan outcomes.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan adalah Dinas Pendapatan Kota Medan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, maka indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran.

Kata kunci : akuntabilitas, pemungutan PBB

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY UN COLLECTION UPT 7 MEDAN CITY DEPARTMENT OF REVENUE

N a m e : DEDDY WILISTYAN
N P M : 121801044
Program : Master of Publik Administration
Adviser I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA
Adviser II : Dr. Warjio, MA

The services provided by the Department of Revenue field through the Technical Implementation Unit should be strictly in accordance with the public interest and based on the aspirations of society, and actions are accountable to the public. Therefore, the Revenue Office Medan through the Technical Implementation Unit should consider whether the exercise of its functions in accordance with what the expectations of society, benefiting the people and care about fairness. Then there must be morally accountable to the public, in other words, shows that the concept of accountability containing a lack of accountability to the public. Can be formulated so that the Revenue Office of Medan have high accountability if the activities and performance of functions accountable to the public. Under these conditions, the authors will conduct research on the United Nations Voting Accountability Technical Implementation Unit 7 North Medan Medan Revenue Service.

This study aims to determine how the United Nations Voting Accountability Technical Implementation Unit 7 North Medan Medan Revenue Service review of aspects: inputs, processes, outputs and outcomes.

Based on the research that has been done is the Revenue Office in Medan carry out the activities that lead to how to optimize the existing infrastructure to support the process of administrative offices, the indicator of the expected results of these activities is the requirement for infrastructure to support the operational administrative services office.

Keywords : accountability, UN voting